



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Implementasi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir pada umumnya dilakukan berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat kematian pewaris. Dalam praktiknya, pencantuman ahli waris lebih banyak berfokus pada keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak, karena pihak tersebut dianggap sebagai ahli waris utama dalam pengelolaan administrasi seperti pengelolaan asuransi, Taspen, maupun pengelolaan harta peninggalan pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir cenderung menyesuaikan dengan data kependudukan dan praktik administrasi yang berkembang di masyarakat.
2. Dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi dengan ketentuan hukum kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, sehingga memiliki hak kewarisan selama masih hidup. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memahami bahwa ahli waris hanya terdiri dari pasangan dan anak pewaris. Selain itu, aparat Kelurahan juga cenderung berpedoman pada data administrasi dan keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang diajukan oleh pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan belum terpenuhinya kepastian dan perlindungan hukum secara maksimal terhadap seluruh pihak yang memiliki hak kewarisan, khususnya orang tua pewaris. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan dalam masyarakat pada umumnya tetap diselesaikan melalui musyawarah keluarga, sehingga orang tua pewaris dalam beberapa kondisi tetap diberikan bagian secara kekeluargaan meskipun tidak tercantum dalam SKW. Dengan demikian, dampak yang muncul lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pemahaman masyarakat serta praktik administrasi dalam pencantuman ahli waris.

B. Saran

1. Bagi pihak kelurahan, diharapkan kepada Kelurahan Tembilahan Hilir agar dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) tidak hanya berpedoman pada data administrasi kependudukan dan keluarga inti pewaris semata, tetapi juga memperhatikan pihak-pihak lain yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan, seperti orang tua pewaris selama masih hidup. Selain itu, Pihak Kelurahan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang termasuk ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan, sehingga pencantuman ahli waris dalam SKW dapat dilakukan secara lebih lengkap dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.
2. Bagi masyarakat diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami ketentuan hukum kewarisan, khususnya mengenai pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris menurut hubungan darah maupun hubungan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perkawinan. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya memahami SKW sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga sebagai dokumen yang berkaitan dengan pencantuman pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Selain itu, penyelesaian pembagian warisan secara musyawarah dan kekeluargaan perlu tetap dipertahankan agar hubungan antaranggota keluarga tetap terjaga serta hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi dengan baik.

